

BAB V

PENUTUP

Bagian ini menyajikan ringkasan akhir yang dirumuskan berdasarkan temuan dari studi yang telah dilaksanakan. Ringkasan ini disajikan untuk membantu pembaca dalam memahami hasil kajian. Di samping itu, bagian ini juga mencantumkan rekomendasi dari peneliti yang berkaitan dengan temuan yang telah diperoleh.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori efektivitas rezim Underdal, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa rezim keamanan ASEAN belum mampu mencapai tingkat efektivitas yang memadai dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dapat dijelaskan melalui interaksi kompleks dari tiga variabel utama yang saling mempengaruhi. Pertama, tingkat kerumitan masalah dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan sangat tinggi, yang tercermin dari tingginya preferensi masalah dan ketidakselarasan aktor. Sengketa ini melibatkan klaim historis Tiongkok melalui "nine-dash line" yang berseberangan dengan klaim negara-negara ASEAN yang juga tidak seragam, mulai dari sikap tegas Vietnam dan Filipina hingga pendekatan moderat dari Malaysia dan Brunei. Ketidakselarasan juga tampak dari perbedaan basis hukum yang digunakan (UNCLOS vs. klaim historis), kesenjangan kapasitas antarnegara, serta campur tangan aktor eksternal seperti Amerika Serikat, yang semuanya menciptakan cleavages kumulatif dalam tubuh ASEAN.

Kedua, kapasitas penyelesaian masalah ASEAN terbatas oleh tiga faktor utama: institutional setting yang lemah (prinsip konsensus dan non-intervensi), distribusi kekuasaan tidak optimal (struktur multipolar tanpa hegemoni yang dapat memfasilitasi agregasi preferensi), dan keterbatasan *skill and energy* (kepemimpinan instrumental lemah dan komunitas epistemik terfragmentasi). Faktor-faktor ini secara kolektif menghasilkan "law of the least ambitious program" di mana posisi kolektif dibatasi oleh anggota paling tidak antusias. Selanjutnya, level kolaborasi ASEAN dalam penanganan sengketa berada pada level 2-3 dari skala enam tingkat, menunjukkan koordinasi dengan aturan eksplisit tetapi implementasi tetap bergantung sepenuhnya pada pemerintah nasional.

Level kolaborasi terbatas ini membatasi kemampuan ASEAN untuk menghasilkan perubahan perilaku dan dampak substansial. efektivitas ASEAN sebagai rezim keamanan regional dalam penyelesaian sengketa LTS sangat terbatas. Meskipun menghasilkan *output* berupa instrumen normatif seperti TAC, DOC, dan upaya COC, *outcome* dan *impact*-nya minimal dengan ketegangan dan militarisasi yang terus meningkat. Berdasarkan standar evaluasi Underdal, ASEAN hanya mencapai perbaikan relatif marginal (skor 2 dari 5) dibandingkan skenario tanpa rezim dan masih jauh dari optimum kolektif (skor 1 dari 4). Interaksi antara kerumitan masalah, keterbatasan kolaborasi, dan lemahnya kapasitas kelembagaan inilah yang menjelaskan mengapa ASEAN masih jauh dari mencapai efektivitas optimal dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian ini, peneliti mengajukan sejumlah usulan untuk memperkuat peran ASEAN dalam menangani sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1. Memperkuat Sentralitas ASEAN melalui Pendekatan Proaktif dan Kohesif

ASEAN perlu bergerak melampaui peran pasif dan reaktif dalam mengelola sengketa Laut Tiongkok Selatan menuju posisi yang lebih proaktif dan tegas, tanpa harus berpihak pada Tiongkok atau Amerika Serikat. Penguatan sentralitas ini dapat diwujudkan melalui:

a. Reformasi Mekanisme Pengambilan Keputusan Internal

Sentralitas ASEAN terhambat oleh prinsip konsensus yang ketat, yang sering menghasilkan kesepakatan minimal dan pernyataan diplomatis yang lemah. ASEAN perlu mempertimbangkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, seperti sistem "ASEAN Minus X" untuk isu-isu maritim strategis, di mana negara-negara yang secara langsung terlibat dalam sengketa dapat mengambil posisi kolektif yang lebih kuat.

b. Pengembangan Kerangka Manajemen Krisis Regional

ASEAN perlu membangun mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis yang lebih canggih untuk menangani insiden di Laut Tiongkok Selatan. Ini mencakup pembentukan sistem peringatan dini regional, protokol komunikasi darurat antara angkatan laut negara-negara ASEAN dan Tiongkok, serta tim mediasi khusus yang dapat dikerahkan dengan cepat saat ketegangan meningkat.

c. Harmonisasi Kebijakan Maritim ASEAN

Ketidakselarasan kebijakan maritim di antara negara-negara ASEAN telah menguntungkan pendekatan bilateral Tiongkok. ASEAN perlu mengembangkan kerangka kebijakan maritim bersama yang mengintegrasikan perspektif keamanan, ekonomi dan lingkungan, yang akan memperkuat posisi kolektif dalam negosiasi dengan Tiongkok.

Seperti yang ditekankan oleh Marty Natalegawa, sentralitas ASEAN bukan sekadar konsep abstrak, melainkan peran aktif dan terdepan dalam membentuk tatanan regional.²¹⁰ Memperkuat sentralitas ASEAN tidak berarti ASEAN harus memilih antara Amerika Serikat atau Tiongkok, tetapi justru harus mengambil posisi yang lebih jelas dan proaktif berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan kepentingan kolektif kawasan.

2. Mendorong Konsesi Konstruktif dari Tiongkok melalui Diplomasi Multilateral yang Diperkuat

Mengadopsi pandangan Kupchan tentang pentingnya akomodasi sepihak dari pihak yang lebih kuat,²¹¹ ASEAN perlu mengarahkan strategi diplomatiknya untuk mendorong konsesi konstruktif dari Tiongkok. Hal ini dapat dicapai melalui:

a. Akselerasi Penyelesaian Code of Conduct (COC) yang Substantif

ASEAN perlu memprioritaskan penyelesaian COC yang bukan hanya mengikat secara hukum, tetapi juga substantif dalam mengatur aktivitas di Laut

²¹⁰ Marty Natalegawa, *Does ASEAN Matter?: A View from Within* (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2019).

²¹¹ Charles A. Kupchan, *How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2010).

Tiongkok Selatan. Ini termasuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, batasan aktivitas militer, dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional. Dengan menekankan keuntungan stabilitas regional bagi kepentingan ekonomi jangka panjang Tiongkok, ASEAN dapat membingkai COC sebagai instrumen yang juga menguntungkan Tiongkok.

b. Internasionalisasi Strategis Sengketa

ASEAN perlu mengembangkan strategi diplomasi multilapis yang melibatkan forum internasional seperti PBB, G20, dan East Asia Summit, untuk menciptakan tekanan konstruktif terhadap Tiongkok. Dengan mengglobalkan isu ini (tanpa mengabaikan sentralitas ASEAN), ASEAN dapat meningkatkan biaya diplomatik bagi Tiongkok jika terus mempertahankan pendekatan unilateralnya.

c. Pengembangan Insentif Kerja Sama Fungsional

ASEAN perlu mengidentifikasi dan mempromosikan area kerja sama praktis yang dapat menciptakan insentif bagi Tiongkok untuk mengadopsi pendekatan yang lebih akomodatif. Ini termasuk proyek bersama dalam konservasi lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, keselamatan maritim, dan eksplorasi sumber daya yang terkoordinasi. Kerja sama ini dapat membangun rasa saling percaya dan mengubah dinamika konfrontatif menjadi kolaboratif.

Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Renato Cruz De Castro, konsesi dari Tiongkok merupakan elemen kunci untuk penyelesaian damai sengketa. Namun, daripada mengharapkan konsesi unilateral, ASEAN perlu menciptakan kondisi di mana konsesi tersebut menjadi pilihan strategis yang rasional bagi Tiongkok dalam konteks kepentingan jangka panjangnya di kawasan.

Kedua rekomendasi ini saling memperkuat sentralitas ASEAN yang diperkuat akan meningkatkan kemampuan untuk mendorong konsesi dari Tiongkok, sementara pendekatan yang lebih konstruktif dari Tiongkok akan memperkuat relevansi dan efektivitas ASEAN sebagai mekanisme pengelolaan sengketa regional.

